



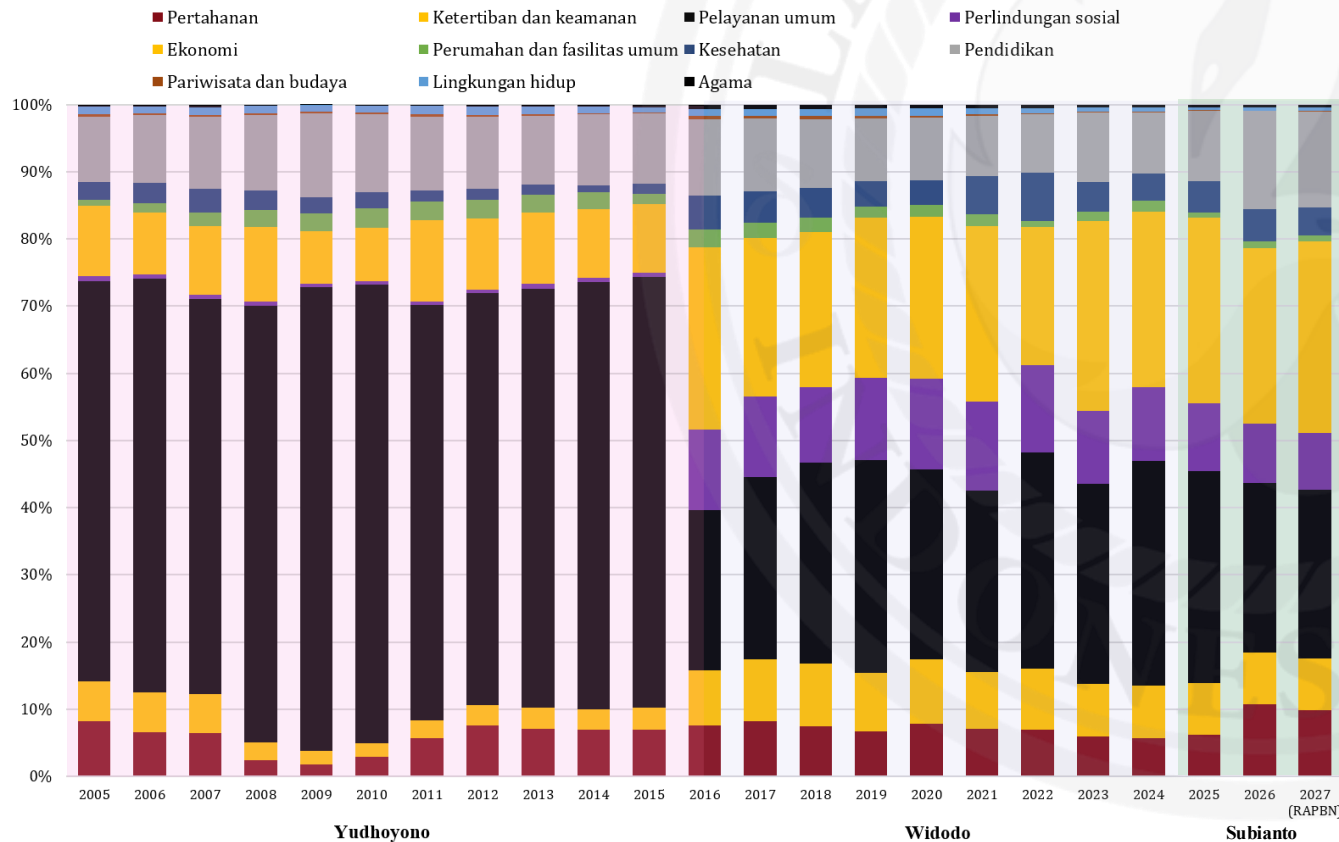
Catatan Dua Tahun Pemerintahan
Prabowo - Gibran Bidang Polhukam:

**Membesarnya TNI-Polri,
Menguatkan Pertahanan dan
Keamanan?**

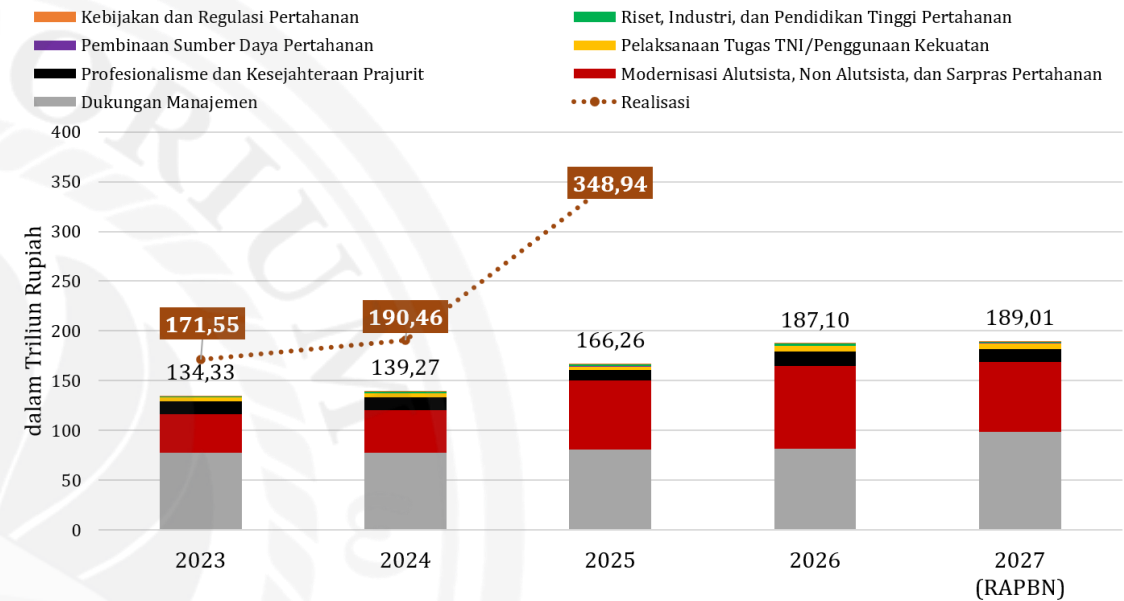
Tren Anggaran Sektor Pertahanan-Kemampuan

Anggaran Kemhan naik menjadi Rp189,01 triliun (RAPBN 2027), namun tantangan modernisasi alutsista tetap ada serta tantangan perluasan satuan TNI. Sementara itu, anggaran Polri dalam RAPBN 2027 mengalami penurunan menjadi Rp139,19 triliun. Tidak ada perubahan berarti pada fungsi penegakan hukum inti — tetap jadi porsi terkecil.

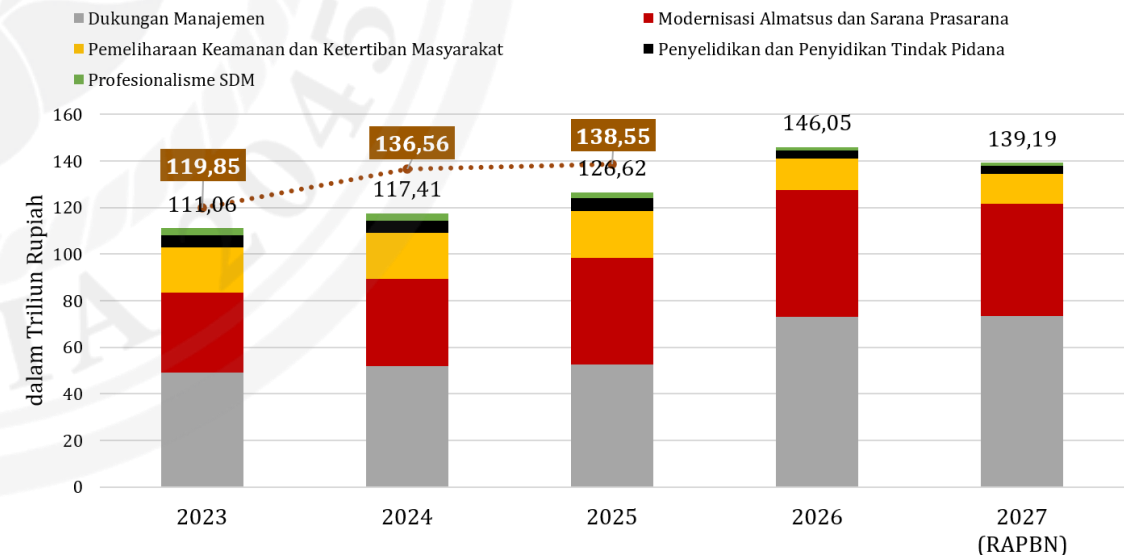
Alokasi APBN Berdasarkan Fungsi



Alokasi Anggaran Belanja Kemhan



Alokasi Anggaran Belanja Polri



Timpang di Prioritas, Rawan di Lapangan

Kenaikan anggaran belum diikuti pengadaan alutsista yang selaras dengan perencanaan. Ekspansi Kodam dan batalyon baru menambah beban anggaran. Risiko konflik agraria melibatkan TNI juga meningkat; data KPA terjadi dari 26 peristiwa atau 10,8% (2023) menjadi 70 peristiwa atau 20,5% (2025).

PENGADAAN DI LUAR PAPARAN PTN

KAAN · jet tempur

48 dipesan · 0 diterima

Fregat kelas Istif

2 dipesan · 0 diterima

KRI Sriwijaya-100 · eks-Garibaldi

1 telah diterima

Fregat kelas Brawijaya

2 telah diterima

KEBUTUHAN PTN YANG BELUM TUNTAS

Jet tempur berat F-15 / pengganti

36 unit · belum ada kontrak pengganti

Pesawat peringatan dini AEW&C

1 unit · platform belum dipilih

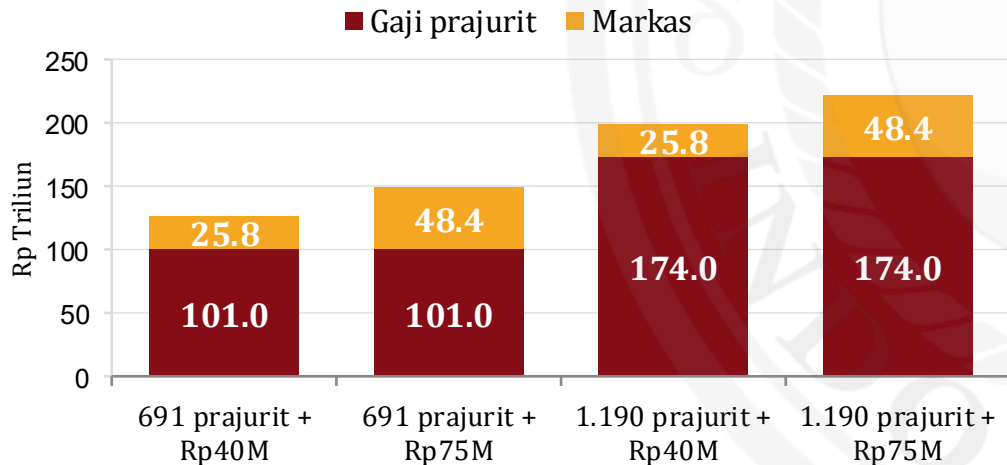
Fregat Merah Putih

2 dibangun dari target 12

Kapal selam taktis

3 dari target 7 masih dibutuhkan

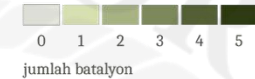
Empat Skenario Biaya Yon TP 2026-2029



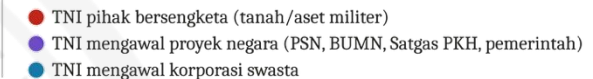
Target: 750 batalyon (2029) dari 105 (Nov 2025, Kadispenad) — merata 161/tahun (2026–2028), 162 (2029). **Gaji:** Rp6 juta/prajurit/bulan × 12 bulan (gaji terendah, Menhan Sjafrie, 19 Mei 2026).

Tidak dihitung: peralatan organik, lahan, latihan & pemeliharaan, gaji ke-13/14, inflasi 2026–2029. Estimasi biaya kotor LAB 45 — bukan angka resmi Kemhan.

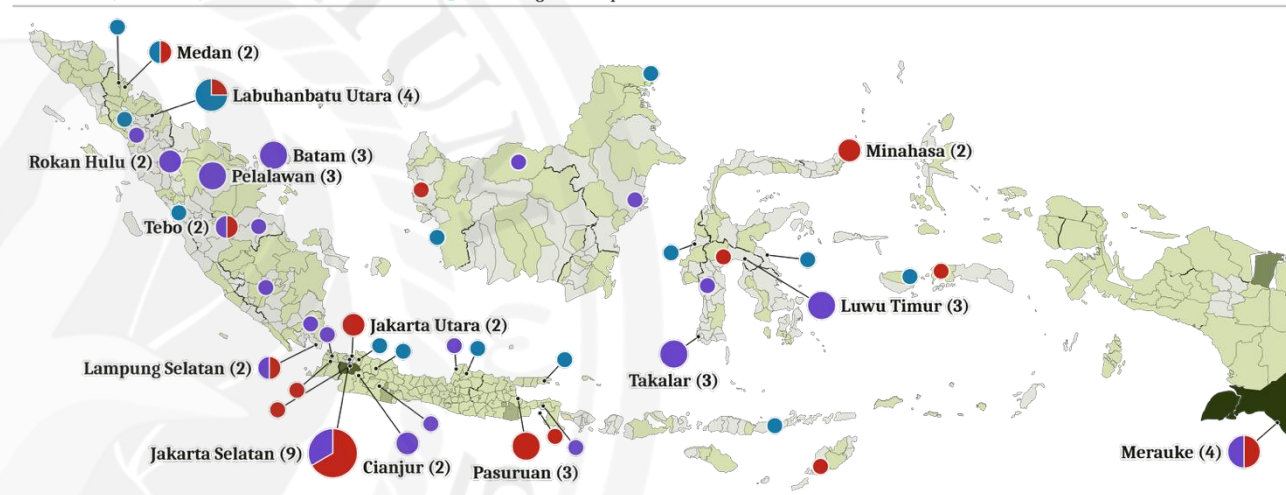
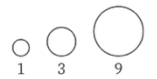
Yonif TP per kabupaten/kota



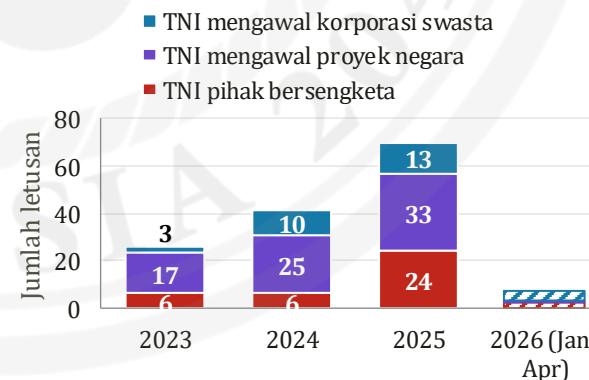
Peran TNI dalam konflik agraria, 2025–2026



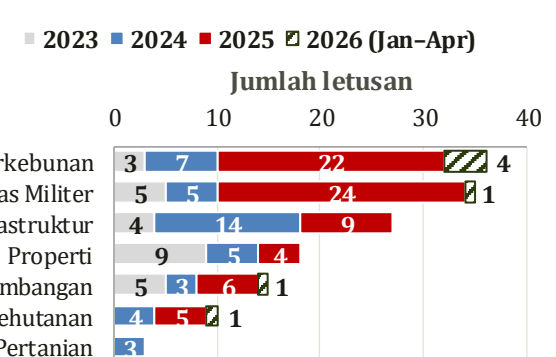
Jumlah letusan



Konflik Agraria Melibatkan TNI



Konflik Berdasarkan Sektor



Sumber: diolah dari Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan berbagai sumber terbuka.

Anomali Program Pembangunan, Lemah di Tugas Utama

Keterlibatan TNI-Polri dalam program pembangunan semakin luas, sementara tugas utama pertahanan dan keamanan masih menghadapi persoalan, utamanya situasi keamanan dalam negeri.

83.380

Target KDMP yang direncanakan ada MoU TNI dengan PT Agrinas

3.838

ASN mengikuti Komcad 2026

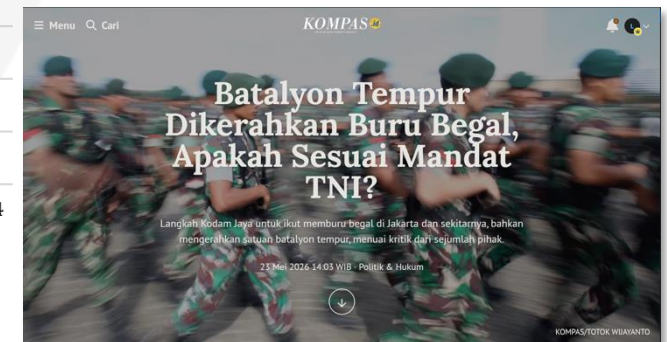
841/1.502

SPPG Polri beroperasi *per Sep 2026



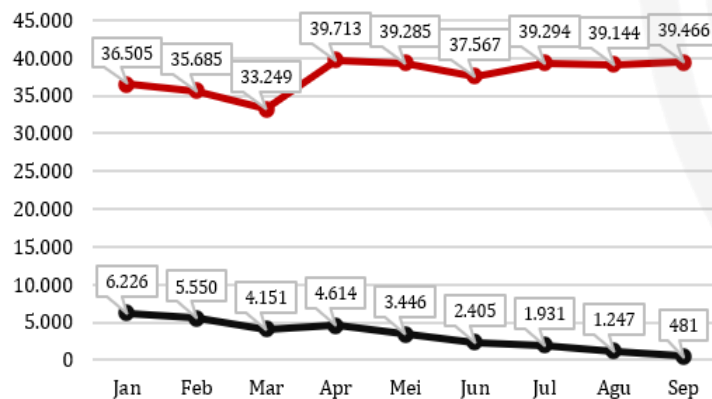
Pasal 14 ayat (1) huruf m UU Polri 5/2026

Hal yang perlu diwaspadai adalah **perbantuan program Presiden** yang menyangkut 'kepentingan strategis nasional' bersifat longgar. Hal ini akan membuat Polri ditarik dengan **agenda politis dan kebijakan pemerintah**.



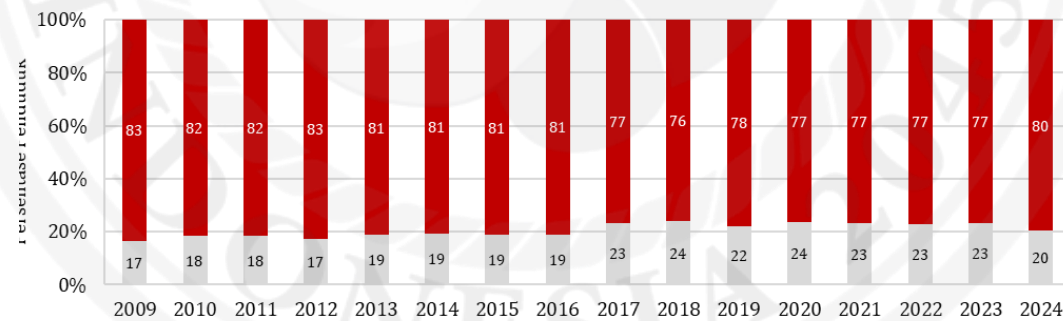
Proporsi Kejahatan 2026

— Jumlah Kejahatan (CT) — Crime Clearance (CC)



Tren Penduduk Melaporkan Kejahatan ke Polri

■ Melapor ■ Tidak Melapor



Sumber: Diolah dari Susenas dalam Statistik Kriminal BPS

Rekomendasi

1 Tunda dan evaluasi perluasan struktur

- Menunda pembentukan Kodam dan Yonif TP baru hingga kebutuhan operasional dan beban anggarannya dievaluasi.
- Mempublikasikan bagian dokumen Perisai Trisula Nusantara yang dapat dibuka kepada publik.
- Memprioritaskan pengadaan alutsista yang sudah direncanakan sebelum menambah pembelian di luar rencana.

2 Kembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama

- Mengevaluasi pelaksanaan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).
- Menghentikan penugasan baru TNI–Polri dalam program nonpertahanan, seperti KDMP, produksi pangan, dan dapur MBG.
- Mengalihkan kegiatan yang sudah berjalan secara bertahap kepada instansi sipil.

3 Hentikan jalan pintas keamanan

- Menghentikan pengerahan pasukan TNI untuk menangani kriminalitas dan demonstrasi.
- Menindak kelompok informal yang mengambil alih kewenangan pengamanan.
- Meningkatkan prioritas anggaran Polri untuk pencegahan kejahatan, penyelidikan, dan penyidikan tindak pidana.

4 Susun legislasi dari kebutuhan nyata

- Mendasarkan kebijakan dan legislasi pertahanan dan keamanan pada kebutuhan keamanan yang nyata dan pertanggungjawaban yang jelas.
- Termasuk pengaturan pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme dan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber.
- Menyelesaikan revisi UU Peradilan Militer bersama DPR dalam tenggat dua tahun yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi.



TERIMA KASIH